

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

BIDANG SEKRETARIAT KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor	:
Tanggal Pembuatan	: Mei 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas,
	<u>Aris Isnawan, S.Pt</u> Pembina NIP. 196105271986031008
Nama SOP	PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI/TUNJANGAN)

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota.
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
- 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri NO 59 Tahun 2007
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010
- 6. Peraturan Daerah Kab. Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.di lingkungan pemerintah Kab Mukomuk

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Menguasai Ilmu Akuntansi.
- 2. Menguasai Penggunaan Aplikasi Keuangan.
- 3. Teliti.

KeterkaitanPeralatan/ Perlengkapan1. SOP Pengelolaan Pajak1. Aplikasi SPP, SPM, SP2D, dan BKU.2. SOP Pengelolaan Keuangan2. Buku-buku Pembantu

3. Keuangan PEMDA

Peringatan

Pencairan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Honor/Tunjangan) akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.

Pencatatan/Pendataan

Database Bidang Keuangan

				Pelaksana				Mutu Wak	tu	
No	Uraian Prosedur	Staf Keuangan /Bendahara	Kasubbag	Sekretaris	Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran	Bagian Keuangan Setda	Kelengka pan	Waktu	Out put	Ket
1	Mempersiapkan, membuat SPP/SPM dan Meneruskannya	mulai	Tid				Aplikasi SPP/SPM	15 Menit	Konsep SPP/SPM	
2	Menerima, Memverifikasi, Menelaah, SPP/SPM, Memaraf dan meneruskannya			Tidak			Konsep SPP/SPM	15 Menit	Konsep SPP/SPM hasil periksa	
3	Menerima, Menelaah, Mengkaji SPP/SPM kemudian memaraf dan meneruskannya .		Ya	←	Tidak		Konsep SPP/SPM	15 Menit	Konsep SPP/SPM hasil periksa	
4	Menerima, Menelaah, SPP/SPM, menandatangani dan Mendisposisi tindak lanjutnya ke bendahara.						Konsep SPP/SPM	15 Menit	SPP/SPM	
5	Menerima, dan Meneruskan proses SPP/SPM ke Bagian Keuangan di Setda				Ya	+	SPP/SPM	1 Hari	SPP/SPM dip roses di bagian keuanagn Setda	
6	Proses Penerbitan SP2D (Pencairan Melalui bank Persepsi).						SPP/SPM	1 Hari	SP2D	
7	Menerima SP2D sebagai dasar pencairan uang belanja tidak langsung	selesa					SP2D			

Lumination	Nomor	:		
	Tanggal Pembuatan	: Mei 2017		
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas,		
BIDANG SEKRETARIAT KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		<u>Aris Isnawan, S.Pt</u> Pembina NIP. 196105271986031008		
	Nama SOP	PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (BARANG/JASA/PIHAK KETIGA)		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	1		
 Undang-Undang Nomor 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri NO 59 Tahun 2007 	 Menguasai Ilmu Akuntansi. Menguasai Penggunaan Aplikasi Keuangan. Teliti. 			
 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010 				
 Peraturan Daerah Kab. Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.di lingkungan pemerintah Kab Mukomuk 				
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan			
 SOP Pengelolaan Pajak SOP Pengelolaan Keuangan SOP Laporan Keuangan Keuangan Pemda 	 Aplikasi SPP, SPM, SP2D, dan BKU. Buku-buku Pembantu 			
Peringatan	Pencatatan/Pendataan			

Database Bidang Keuangan

Pencairan Anggaran Belanja Langsung (Barang-Jasa/Pihak Ketiga) akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.

PROSEDUR : PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (BARANG-JASA/PIHAK KETIGA)

			Pelaksana							
No	Uraian Prosedur	Staf Keuangan/ Bendahara	Kasubbag	Sekretaris	Pengguna Anggaran	Bagian Keuangan Setda	Kelengkapan	Waktu	Out put	Ket
1	Melakukan Verifikasi Dokumen kontrak dengan Pagu Anggaran dan menerbitkan SPP.	mulai					Dokumen Kontrak	1 jam	Terbit SPP	
2	Menerima, Memverifikasi, dan Menelaah SPP/SPM meneruskannya			Tidak			SPP	1 jam	Terbit SPM	
3	Menerima, Menelaah, Mengkaji SPP/SPM, Memaraf dan meneruskannya .						SPM	1 jam	SPM hasil periksa	
4	Menerima, Menandatangani dan mendisposisi ke bagian keuangan Setda.			Ya			SPM	1 jam	SPM hasil periksa	
5	Menerima, Meneruskan proses SPP/SPM/ ke Keuangan Setda				<u> </u>					
5	Proses pemeriksaan SPM dan Penerbitan SP2D.	—			-	selesai	SPM	1 Hari	SP2D	



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

BIDANG SEKRETARIAT KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor	:
Tanggal Pembuatan	: Mei 2017
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas, Aris Isnawan, S.Pt Pembina NIP. 196105271986031008
Nama SOP	PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (UP/GU/TU)
Kualifikasi Pelaksana	

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota.
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
- 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri NO 59 Tahun
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010
- 6. Peraturan Daerah Kab. Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.di lingkungan pemerintah Kab Mukomuk

Kuaiiiikasi Pelaksana

- Menguasai Ilmu Akuntansi.
- 2. Menguasai Penggunaan Aplikasi Keuangan.
- 3. Teliti.

Keterkaitan

Peringatan

- SOP Pengelolaan Pajak
- SOP Pengelolaan Keuangan
- 3. SOP Laporan Keuangan
- 4. Keuangan Pemda

Pencairan Anggaran Belanja Langsung (UP/GU/TU) akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.

Peralatan/ Perlengkapan

- 1. Aplikasi SPP, SPM, SP2D, dan BKU.
- 2. Buku-buku Pembantu
- Pencatatan/Pendataan

Database Bidang Keuangan

PROSEDUR: PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (UP/GU/TU)

				Pelaksana			Mutu Waktu			
No	Uraian Prosedur	Staf Keuangan/ Bendahara	Kasubbag	Sekretaris	Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran	Bagian Keuangan Setda	Kelengkapan	Waktu	Out put	Ket
1	Melakukan Verifikasi Dokumen kontrak dengan Pagu Anggaran dan menerbitkan SPP/SPM.	mulai					Aplikasi SPP/SPM	15 Menit	Konsep SPP/SPM	
2	Menerima, Memverifikasi, dan Menelaah SPP/SPM meneruskannya		•	Tidak			Konsep SPP/SPM	15 Menit	Konsep SPP/SPM hasil periksa	Panah Balikan menandakan konsep perlu
3	Menerima, Menelaah, Mengkaji SPP/SPM, Memaraf dan meneruskannya .			-			Konsep SPP/SPM	15 Menit	Konsep SPP/SPM hasil periksa	Panah Balikan menandakan konsep perlu
4	Menerima, Menandatangani dan mendisposisi ke bagian keuangan Setda.			Ya	+		Konsep SPP/SPM	15 Menit	SPP/SPM	Panah Balikan menandakan konsep perlu
5	Menerima, SPP/SPM, dan meneruskannya .		V				SPP/SPM	1 Hari	SPP/SPM dip roses di bagian keuanagn Setda	
6	Menerima, Memverifikasi dan memproses SP2D.						SPP/SPM	1 Hari	SP2D	
7	Menerima SP2D sebagai dasar pencairan uang belanja tidak langsung	selesai					SP2D			



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

BIDANG SEKRETARIAT KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri NO 59

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (lembaga

Standar Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

Negara Republik Indonesia tahun 2010

Dasar Hukum

Tahun 2007

Nomor	:								
Tanggal Pembuatan	: Mei 2017								
Tanggal Revisi									
Tanggal Efektif	:								
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas,								
	Aris Isnawan, S.Pt								
	Pembina								
	NIP. 196105271986031008								
Nama SOP	PENGELOLAAN KEUANGAN								
Kualifikasi Pelaksana	Kualifikasi Pelaksana								
1. Menguasai Ilmu	Akuntansi.								
2. Teliti.									
nn									
Peralatan/ Perlengkap	oan								
1. Agenda Kegiatan									
2. Bukti pengeluaran	ı (struk/Kwitansi)								
3. SPJ									
Pencatatan/Pendataar	1								
1 D (1 D'1									

6. Peraturan Daerah Kab. Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.di lingkungan pemerintah Kab Mukomuk Keterkaitan 1. SOP Pencairan Anggaran Belanja Langsung (Belanja Barang dan Jasa 2. SOP Pencairan Anggaran Belanja tidak; langsung 3. SOP Laporan Keuangan Peringatan Penyusunan Laporan Keuangan akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya. Penyusunan Laporan Keuangan 1. Agenda Kegiatan 2. Bukti pengeluaran (struk/Kwitansi) 3. SPJ Pencatatan/Pendataan 1. Database Bidang Keuangan. 2. Neraca Keuangan.

PROSEDUR: PENGELOLAAN KEUANGAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Wakt	Ket	
		PPTK	Bendahara	PA/KPA	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	Membuat rencana anggaran dan Mengkonsultasikan ke Bendahara pengeluaran	mulai			Uang persediaan untuk kegiatan	1 Hari	Rencana Kegiatan	
2	Menerima, mengoreksi dan pengajuan anggaran seluruh pengelola kegiatan/PPTK				Rencana Kegiatan	3 jam	Kesepahaman tentang alokasi dana	
3	Menyerahkan dana ke seluruh PPTK.		•		Kesepahaman tentang alokasi dana	1 Hari	Dana diterima seluruh PPTK	
4	Melakukan Penghitungan Pemotongan Pajak	•			Dana Kegiatan	1 Hari	Pemotongan Pajak	
5	Menyusun pertanggung jawaban dan memberikannya ke bendahara				Bukti Pengeluaran (Struk/Kwitansi)	1 Hari	Laporan Pertanggung jawaban/SPJ	
6	Menerima dan mengarsip laporan Pertanggung jawaban		selesai		SPJ		Pengarsipan SPJ	



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

BIDANG SEKRETARIAT

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dasar Hukum

Nomor	:	
Tanggal Pembuatan	:	Mei 2017
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas,
		Aris Isnawan, S.Pt
		Pembina
		NIP. 196105271986031008
Nama SOP	PENGELOLAAN PAJAK	
Nama SOP Kualifikasi Pelaksana	PENGELOLAAN PAJAK	
Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai Ilmu Akunt		
Kualifikasi Pelaksana		
Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai Ilmu Akunt		
Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai Ilmu Akunt	ansi.	
Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai Ilmu Akunt 2. Teliti.	ansi.	
Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai Ilmu Akunt 2. Teliti. Peralatan/ Perlengkapa	ansi.	
Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai Ilmu Akunt 2. Teliti. Peralatan/ Perlengkapa	ansi.	

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara	1. Menguasai Ilmu Akuntansi.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	2. Teliti.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan	
dan Pertanggung jawaban keuangan Negara.	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Pencairan Anggaran Belanja Langsung	1. SSP
2. SOP Pencairan Anggaran Belanja tidak angsung	
3. SOP Pengelolaan Keuangan	
4. SOP Laporan Keuangan	
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Pengelolaan Pajak akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.	Database Bidang Keuangan.

PROSEDUR: PENGELOLAAN PAJAK

No	Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Waktu		
110	Craian Troscadi	PPTK/Rek anan	Staf Keuangan	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Out put	Ket
1	Menyerahkan faktur pajak kepada staf keuangan	mulai			SSP	1 jam	Perhitungan Pajak dalam SSP	
2	Menerima faktur pajak dan meneruskannya ke bendahara				Perhitungan Pajak dalam SSP	1 jam	SSP diterima bendahara	
3	Memverifikasi kesesuaian perhitungan pajak dengan nilai pembelian				Perhitungan Pajak dalam SSP	1 jam	Perhitungan Pajak sesuai dengan nilai pembelian	
4	Memungut pajak dan melakukan penyetoran pajak dan memberikan salinan setoran pajak ke PPTK/rekanan.				Perhitungan pajak sesuai dengan nilai pembelian	2 jam	Bukti Setoran Pajak diterima PPTK/Rekanan	
5	Menerima salinan setoran pajak (Bukti Setor Pajak)	Selesai			Bukti Pengeluaran (Struk/Kwitansi)			

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Nomor	:
	Tanggal Pembuatan	: Mei 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	:
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas,
BIDANG SEKRETARIAT KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		<u>Aris Isnawan, S.Pt</u> Pembina NIP. 196105271986031008
	Nama SOP	LAPORAN KEUANGAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri NO 59 Tahun 2007. 	 Menguasai Ilmu Teliti. 	ı Akuntansi.
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkap	oan
 SOP Pencairan Anggaran Belanja Langsung SOP Pencairan Anggaran Belanja tidak angsung SOP Pengelolaan Keuangan SOP Laporan Keuangan SOP Pencairan Anggaran Belanja Langsung (Belanja Barang/Jasa). 	1. SPJ 2. BKU 3. LRA	Konsep Laporan Pertanggungjawaban Konsep Laporan Keuangan
Peringatan	Pencatatan/Pendataan	
Penyusunan Laporan Keuangan akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.	Database Bidang Ket Neraca Keuangan.	uangan.

PROSEDUR: PELAPORAN KEUANGAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Waktu			Ket
		Staf Keuangan/ Bendahara	Kasubbag	Sekretaris	Kepala Dinas (PA)	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	Mengumpulkan bukti-bukti pertanggungjawaban	mulai				SPJ	1 Hari	Hasil Inputan SPJ	
2	Membuat Konsep Laporan Pertanggung Jawaban dan meneruskannya ke Bendahara.	-	Tidak			Hasil Inputan SPJ	1 Hari	Konsep Laporan Pertanggugjawaban	
3	Menerima, ,Memverifikasi, Mengoreksi, Mengkaji, Konsep Laporan Pertanggungjawaban, Memaraf Meneruskannya	Ya		Tidak		Konsep Laporan Pertanggungjawaban	1 Hari	Konsep Laporan hasil periksa	Panah Balikan menandakan konsep perlu
4	Menerima, Mengoreksi Laporan Pertanggung Jawaban, dan meneruskannya ke kabid Keuangan.					Konsep Laporan Pertanggungjawaban	1 Hari	Konsep Laporan hasil periksa	Panah Balikan menandakan konsep perlu
5	Mengutus untuk Melakukan Rekonsiliasi dengan bagian Keuangan Setda.			Ya		Konsep Laporan hasil periksa	7 Hari	Konsep Laporan Keuangan Dinas	
6	Menerima, menelaah memriksa dan menandatangani laporan keuangan					Laporan Keuangan Dinas	2 Jam	Konsep Laporan hasil Rekonsiliasi	
8	Menjilid Laporan dan menggandakanya n	selesai			1	Laporan Keuangan	1 Hari	Penjilidan	